

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Emal Pablo¹, Andriyus²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* exmalpablo09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berada di lokasi Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pemerintah Desa Pesikaian serta identifikasi rumah layak huni yang tidak tepat sasaran mengakibatkan kecemburuan sosial. Metode Penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif, untuk Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Kesimpulan Dari Penelitian ini yaitu Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dinilai cukup baik hal ini dikarenakan tidak adanya kendala dalam perbaikan rumah warga sampai pada akhirnya rumah warga menjadi terselesaikan, namun masih minimnya responsif pemahaman program yang diketahui oleh Pemerintah Desa Pesikaian terkait syarat penerima bantuan yang layak diterima oleh warga desa pesikaian sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran bagi warga yang tidak layak menerima bantuan, salah satunya adanya warga desa pesikaian yang awalnya tidak memiliki rumah akhirnya memiliki rumah dengan adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian. Sementara Sosialisasi Program Badan Stimulan Perumahan Swadaya yang di sampaikan Pemerintah Desa Pesikaian belum baik hal ini dikarenakan tidak semua warga mengetahui kriteria program tersebut dan masih minimnya Pemahaman Pemerintah Desa Pesikaian terkait tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi kriteria warga yang menerima bantuan meskipun Program Berjalan Dengan Baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Abstract

This study aims to determine the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) which is located in Pesikaian Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. understanding the program and the identification of livable houses that were not on target resulted in social jealousy. This research method uses descriptive qualitative, for data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. This study uses the Theory of Policy Implementation namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucracy. The conclusion from this study is that the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Pesikaian Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency is considered quite good, this is because there are no obstacles in repairing residents' houses until finally the residents' homes are resolved, but there is still a lack of responsive understanding of the program what was known by the Pesikaian Village Government related to the conditions for beneficiaries who deserved to be received by Pesikaian villagers so that it resulted in not being right on target for residents who did not deserve assistance, one of which was the existence of Pesikaian villagers who initially did not have a house finally had a house with the Housing Stimulant Assistance Program Self-help (BSPS) in Pesikaian Village. While the Socialization of the Self-Help Housing Stimulant Agency Program conveyed by the Pesikaian Village Government is not good, this is because not all residents know the program's criteria and there is still a lack of understanding of the Pesikaian Village Government regarding the objectives of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program for the criteria of residents who receive assistance even though the Program is Running Well

Keywords : Policy, Implementation, Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS)

PENDAHULUAN

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan pada keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melibatkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Rumah masyarakat yang rusak akibat terkena bencana alam maupun rumah yang tidak layak huni.

Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana dan utilitasnya. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli terhadap rumah/tempat tinggal sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Adapun Syarat Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang boleh menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Peraturan Menteri Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :

1. Memiliki Rumah Sendiri atas nama pemiliknya
2. Kerusakan Komponen utama bangunan rumah seperti Atap, Lantai dan dinding
3. Luas Rumah tidak Sesuai Standar per orang
4. Tidak Menyehatkan bagi pemilik/penghuni rumah.
5. Terletak Di daerah Konstruksi Bangunan membahayakan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk kelompok kerja (Pokja) Kabupaten/Kota. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi harus mengacu kepada petunjuk teknis yang telah diserahkan oleh kementerian PUPR kepada daerah. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, hal ini akan memudahkan pihak dinas dalam membuat rencana kerja tentang program BSPS khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehingga tentu nya Dinas tersebut melakukan koordinasi hubungan kerjasama dengan pemerintah desa setempat yang mendapat jatah program bantuan stimulant perumahan bagi pemilik rumah warga yang tidak layak huni karena berpengasilan

rendah. serta peran pemerintah desa setempat sekiranya mampu dalam hal ini memonitoring dan mengawasi jalannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian.

Berikut Data jumlah penerima bantuan bedah rumah pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya semua Desa yang berada di Kecamatan Cerenti Tahun 2019 :

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Semua Desa Di Kecamatan Cerenti Tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Yang di Bedah
1	Kel. Pasir Cerenti	
2	Koto Peraku	
3	Kompe Berangin	
4	Sikakak	20 Unit
5	Kampung Baru	
6	Pulau Jambu	
7	Koto Cerenti	
8	Pulau Bayur	
9	Pl. Panjang Cerenti	
10	Pesikaian	20 Unit
11	Teluk Pauh	
12	Tanjung Medang	7 Unit
13	Kampung Baru Timur	
	Total	47 Unit

Desa Pesikaian mendapatkan Bantuan Program Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 20 rumah unit. Hal ini dikarenakan dilatarbelakangi terkait adanya 20 rumah warga tidak layak huni perimbangan daerah konstruksi bangunan rumah yang membahayakan serta tingkat komponen rumah warga yang buruk seperti atap rumah yang rusak, tembok rusak yang retak untuk di identifikasi, selain itu juga pertimbangan Luas Standar ukuran rumah tidak sesuai dengan jumlah per orang bagi pemilik penghuni rumah.

Namun berdasarkan informasi dari penulis menyatakan bahwa salah seorang warga (Mantan kepala dusun) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi beliau menerangkan bahwasannya dalam kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai tidak tepat sasaran bagi warga sebagai bentuk penyaluran bantuan terhadap masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumahnya beserta prasarannya agar lebih layak huni. Selain itu juga peran masyarakat desa pesikaian juga dinilai kurang kooperatif hal ini terdapat warga yang menerima bantuan tidak sesuai

Untuk penyelesaian bedah rehab rumah yang tidak layak huni Berdasarkan informasi dari kepala dusun Desa Pesikaian bahwa pada periode Tahun 2015-2020 mengatakan bahwasannya data keuangan masyarakat Desa Pesikaian yang terdapat ada dalam penyelesaian rumah warga tidak ditentukan jumlah nominalnya melainkan kesanggupan warga Desa Pesikaian yang memiliki rumah layak huni.

Untuk Data Jumlah kepala keluarga Desa Pesikaian yang tidak mampu ikut program perumahan BSPS periode tahun 2019 dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2019 di Desa Pesikaian sebanyak 20 rumah mampu menyelesaikan rumah beserta sarana dan prasarannya. selain itu juga tingkat pemahaman masyarakat Desa Pesikaian yang ikut menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih minim hal ini dikarenakan masih kurang aktif melakukan sosialisasi pengenalan dalam pemahaman program tersebut yang

disampaikan oleh pihak Pemerintah Desa Pesikaian kepada warga penerima bantuan Program bedah rumah tersebut.

Sehingga ditemukan beberapa fenomena permasalahan yang muncul diantaranya sebagai berikut seperti minimnya Sumber daya Bantuan untuk perbaikan bedah perumahan masyarakat Desa Pesikaian hal ini dikarenakan masih kurangnya identifikasi dalam kebutuhan rumah, sehingga mengakibatkan masih ada beberapa perumahan warga Desa Pesikaian yang belum memadai seperti atap rumah yang rusak, tembok rumah yang retak dan lain lain. Selain itu, masih kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada partisipan masyarakat Desa Pesikaian dalam hal pemahaman Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya khususnya terkait melengkapi syarat masuk rumah tidak layak huni sehingga mengakibatkan masyarakat yang ikut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih belum memahami.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliitan ini yaitu deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk menyelidikan objek yang tidak dapat di ukur dengan angka-angka karena bertujuan menggambarkan fakta, keadaan, dan fenomena sebenarnya saat penelitian berlangsung.

Sugiyono (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran yang lengkap yang dibentuk dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dengan latar ilmiah.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang merupakan data dari hasil observasi yaitu wawancara kepada responden dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana dan utilitasnya. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli terhadap rumah/tempat tinggal sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan analisis serta mengobservasi jawaban infroman mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal membahas terkait Implementasi Kebijakan Progam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dikarenakan terdapat sasaran program yang kurang tepat mulai dari perbaikan perumahan bagi masyarakat tidak mampu sampai tingkat pemahaman masyarakat yang kurang baik. sehingga perlu dilakukan pengkajian analisis dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (dalam Agustino. 2008;149) yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

KOMUNIKASI

Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III (dalam Agustino. 2008;149) menjelaskan bahwa Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang

bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Dengan adanya Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Maka pelaksanaan kebijakan program akan dapat dipahami bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan mulai dari Sosialisasi Program, Adanya tujuan Program dan Sasaran Program yang tepat yang berada di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dari:

a. Sosialisasi Program.

Sosialisasi Program dalam hal ini yaitu Sosialisasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian kepada masyarakat desa pesikaian yang ikut menerima bantuan program tersebut terkait poin-poin penting dalam aturan yang berlaku agar masyarakat desa pesikaian bisa memahami tanpa kesalah pahaman. untuk itu sosialisasi Program ini sebagai pengenalan awal untuk diketahui oleh semua masyarakat Desa Pesikaian.

Sementara Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Pesikaian dinilai kurang baik hal ini dikarenakan karena waktu yang singkat dan terbatas serta tidak semua warga mengetahui program tersebut sehingga masih terjadinya kecemburuan sosial di tengah masyarakat Desa Pesikaian. hal ini dibuktikan tidak semua warga Memahami program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian dalam penyampaian sosialisasi pengenalan Program Bantuan Bedah Rumah Swadaya tersebut akibat waktu yang singkat dan terbatas.

b. Adanya Tujuan Program Yang Jelas

Tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian dinilai baik hal ini dikarenakan dampak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program bantuan tersebut yaitu perbaikan rumah tidak layak huni meskipun tidak semua warga yang mengetahui adanya program BSPS. Akan tetapi bagi masyarakat Desa Pesikaian yang ikut menerima bantuan program merasakan dampak positif dari tujuan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian yang mana rumah warga sekiranya yang tidak layak huni diperbaiki dengan adanya program bantuan tersebut. sehingga dalam hal ini bedah perbaikan rumah warga terselesaikan dengan baik.

c. Sasaran Program

Sasaran Program dalam hal ini yaitu Sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian untuk bagi warga warga yang layak menerima bantuan program perumahan swadaya tersebut. Sebagaimana dalam hal ini yaitu untuk warga warga yang memiliki rumah tidak layak huni karena tidak memiliki biaya untuk perbaikan rumah nya.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa dalam Sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian dinilai baik hal ini dikarenakan Sasarannya program bantuan ini adalah untuk warga yang memiliki rumah tidak layak huni karena tidak memiliki dana untuk perbaikan rumah. Masyarakat Desa Pesikaian yang ikut menerima bantuan program sasaran programnya juga ada melibatkan warga yang masih kelayakan huni Pilihan Rumah warga karena hal ini atas pertimbangan pemilihan Pemerintah Desa Pesikaian dalam menganalisa keadaan rumah warga mana saja yang sesuai penilaian Kepala Desa Pesikaian terkait tidak layak huni.

Oleh karena itu dalam hal komunikasi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pesikaian pada umumnya mengatakan bahwa Komunikasi terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian kepada masyarakat memahami tujuan program untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Namun disisi lain terdapat komunikasi yang kurang baik hal ini dikarenakan sosialisasi programnya yang disampaikan pihak pendamping teknis fasilitator dan juga pemerintah Desa Pesikaian selaku pihak kepala Desa Pesikaian kurang baik karena hanya menyampaikan tujuan program untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan apalagi juga waktu yang terbilang singkat untuk disampaikan poin poin pentingnya yang kurang dipahami apalagi menyangkut kriteria warga dari kalangan mana yang pantas menerima bantuan program tersebut juga kurang dimengerti oleh masyarakat Desa Pesikaian bahwa juga tidak semua warga desa pesikaian mengetahui terkait adanya pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Pesikaian sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat terkait hal ini, sebab hanya beberapa warga Desa Pesikaian saja yang mengetahui program bantuan bedah rumah tersebut.

SUMBER DAYA

Dalam hal ini pada Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan Sumber Daya yang berkualitas yakni dari segi Tersedianya Sumber daya yang Berkualitas, Tersedianya Anggaran dan Fasilitas Pendukung.

a. Tersedianya SDM yang Berkualitas

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Tersedianya sumber daya dalam hal ini yang berkualitas yaitu merujuk pada tenaga fasilitator sebagai pelaksana program dari pihak kami dinas perkim bertujuan mensosialisasikan program, tujuan, dan sasaran program bersama kepala desa, dusun, serta tokoh tokoh masyarakat desa yang mengikuti program ini lalu pihak tenaga fasilitator bekerja sama yang telah ditunjuk akan menyampaikan program program kriteria penerima bantuan ini seperti apa itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya inilah yang kami maksud dalam sumber daya manusia sampai pada pelaksanaan pun kami beserta jajaran melibatkan pemerintah desa setempat saling bahu membahu akan hal program ini dari memonitoring sampai selesai.

Sehingga Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Cukup beragam baik kinerja pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni dan juga pemahaman program nya. Begitupun dengan pengakuan Masyarakat Desa Pesikaian yang ikut menerima bantuan program menilai Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini cukup baik dari kinerja dalam pelaksanaannya dan hanya saja untuk pihak pemerintah desa pesikaian yaitu Kepala Desa Pesikaian memiliki kualitas sumber daya manusia yang kurang baik pada pemahaman program baik komunikasi sosialisasi terhadap masyarakat Desa Pesikaian.

b. Adanya Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal anggaran Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian anggaran yang tersedian berasal dari anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) karena dari pencairan pemerintah pusat dimana bagi penerima bantuan berjumlah Rp. 20.000.000 Dengan rincian Rp. 17.500.000 untuk Bahan Bahan perbaikan rumah dan Rp. 2.500.000 untuk Upah perbaikan rumah warga. Begitupun dengan penetapan lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Penetapan keputusan

penerima bantuan Pencairan bantuan Penyaluran bantuan yang dilakukan dengan pemantauan monitoring kemudian selanjutnya akan dilakukan pencairan ke warga warga yang menerima bantuan tersebut. Hal ini sudah di koordinasikan dengan pemerintah desa setempat terlebih dahulu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tersedianya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Cukup baik. Begitupun dengan pengakuan dari Masyarakat Desa Pesikaian yang ikut sebagai penerima menilai bahwa tersedianya Anggaran dalam hal ini cukup baik dari kinerja Yang mana ini sudah sesuai dari wacana pemantauan lokasi yang sudah di koordinasi dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang mana melibatkan pihak pendamping fasilitator dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pesikaian. Anggaran yang sangat membantu terutama ketersediaannya anggaran membuat warga tersebut bisa memperbaiki rumah yang tidak layak huni dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya apalagi juga pemilihan peserta penerima bantuan juga ditentukan oleh Kepala Desa Pesikaian.

c. Fasilitas Pendukung

Dari hasil wawancara untuk fasilitas pendukung yang diutamakan adalah Berupa Anggaran Dana pencairan dari Pemerintah Pusat, yaitu anggaran APBN untuk bahan bahan perbaikan rehab rumah tidak layak huni yang selalu ada dimana pemerintah desa pesikaian sudah melakukan koordinasi mengenai penentuan toko toko yang menyuplai bahan bahan nya sehingga untuk fasilitas pendukung pada bahan bahan berjalan dengan baik. hal yang lain juga ini ditentukan lokasi toko yang strategis untuk bisa di bagikan bahan bahan perbaikan rumah seperti semen, batu, pasir, batako dan lain lain ke semua desa.

Sehingga dapat diketahui bahwa tersedianya Fasilitas pendukung pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Cukup baik dimana fasilitas pendukung yang diutamakan adalah anggaran dan bahan bahan untuk perbaikan bedah rumah warga yang tidak layak huni. hasilnya dapat dilihat perbaikan rumah warga yang tidak layak huni berjalan dengan baik tanpa adanya kendala baik anggaran maupun bahan bahan perbaikan rumah warga yang ikut menerima Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian.

Oleh karena itu dalam hal sumber daya, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Pada Sumber daya dinilai cukup baik dari segi ketersediaannya anggaran dan fasilitas pendukung pada bahan bahan bantuan perbaikan rumah warga, namun pada sumber daya manusia dalam hal ini masih belum baik hal ini dikarenakan terdapat tingkat pemahaman masyarakat Desa Pesikaian sebagai penerima bantuan pada program tersebut masih rendah disebabkan sosialisasi dari pihak program tenaga fasilitator yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu juga disatu sisi yang lain tanggapan dari Kepala Desa Pesikaian juga mengakui bahwa pelaksanaan program yang belum dipahami karena waktu yang terbatas dalam penyampaian poin poin penting. selain itu juga tidak menyeluruh pada pemahaman kriteria yang layak sebagai warga desa pesikaian sebagai penerima dinilai tidak resposif pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

DISPOSISI

Disposisi Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan

mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam hal ini merujuk pada Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Melihat sikap reaksi Disposisi dari pelaksanaan Program Tersebut yakni dari segi Tingkat Pengetahuan Program, Respon Pelaksana dan Respon Kelompok Sasaran.

a. Pengetahuan Program

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam pengetahuan pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini poin poin nya adalah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan catatan bukan masyarakat miskin atau tidak punya rumah, melainkan masyarakat yang memiliki rumah tetapi memiliki rumah yang tidak layak huni maupun rusak karena warga tersebut atau yang boleh menerima bantuan adalah warga yang tidak memiliki biaya pribadi untuk memperbaiki kondisi rumah. Akan tetapi pada tingkatan pemerintahan desa tidak semua dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program BSPS. Sehingga dalam Pengetahuan program pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian dinilai kurang baik terutama untuk di tingkatan pemerintahan desa.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam pengetahuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang di utamakan adalah Bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni karena berpenghasilan rendah, sementara dari pemahaman yang disampaikan pihak kepala desa pesikaian hanya mengetahui tujuan program tersebut untuk perbaikan rumah saja dan tanpa memperhatikan syarat kriteria warga yang layak menerima bantuan tersebut yang sudah ditentukan dan dipilih oleh Kepala Desa Pesikaian.

b. Respon Pelaksana Program

Respon Pelaksana Program yang dimaksud adalah Respon yang diketahui oleh pihak pelaksana program dan kelompok sasaran yang sudah mengalami setelah dilakukan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Pesikaian yaitu koordinasi pihak Pemerintah Desa Pesikaian dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Respon yang diterima baik dari sisi pelaksana program maupun kelompok sasaran sejauh ini cukup baik. Karena masyarakat desa pesikaian merasa sangat terbantu akan adanya program BSPS dimana rumah yang awalnya dalam kondisi tidak layak huni menjadi layak untuk dihuni. Begitupun dengan pelaksana program, respon pelaksana program tentu dengan melakukan koordinasi dari pihak dinas perkim dengan pemerintah desa setempat untuk dilakukan kesiapan matang mulai dari anggaran dan bahan bahan kebutuhan warga dalam perbaikan rumah warga tidak layak huni. Sehingga untuk Respon Pelaksana Program pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian cukup baik.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam Respon Pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di utamakan adalah Respon Koordinasi dari pihak pemerintah desa pesikaian dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang cukup baik dalam menganggapi keadaan respon yang dibutuhkan warga terkait bantuan fasilitas pendukung seperti anggaran dan bahan bahan perbaikan bedah rumah pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian.

c. Respon Kelompok Sasaran.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Antusias respon warga cukup tinggi dengan adanya program bantuan BSPS ini terutama bagi desa pesikaian salah satunya mendapatkan bantuan jatah sebanyak 20 rumah sehingga respon nya positif, respon kelompok sasaran juga yang mana sebelum penerima bantuan dibagilah beberapa kelompok penerima bantuan yang mana kelompok tersebut satu sampai dua puluh yang akan memonitoring pelaksana yaitu pihak pemerintah desa setempat dalam memfasilitasi nya mulai dari pemilihan warga yang nerima bantuan, bahan bahan perbaikan rumah sampai biayanya untuk penerima bantuan yang ditentukan oleh pemerintah desa setempat. Kelompok sasaran merespon dalam hal ini merasa terbantu dengan adanya program BSPS ini sesuatu yang krusial untuk mereka dalam menerima bantuan bedah rumah karena masyarakat yang tidak punya rumah jadi punya rumah karena adanya program ini. Untuk itu Respon Kelompok Sasaran pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian cukup baik.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam Respon Pelaksana Sasaran pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di utamakan adalah Respon antusiasme yang dirasakan oleh masyarakat desa pesikaian khususnya bagi warga penerima Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian cukup tinggi merasa terbantu bahkan dari pengakuan warga penerima bantuan juga awalnya beliau tidak punya rumah menjadi punya rumah dengan adanya kebijakan program bantuan bedah rumah tersebut.

Berdasarkan penjelesan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Pada Disposisi beragam reaksi tanggapannya, dalam hal ini dari segi Pengetahuan saja dari pihak Kepala Desa Pesikaian belum mengetahui secara menyeluruh hanya mengetahui tentang tujuan program dalam memperbaiki rumah warga yang rusak. sementara di satu sisi yang lain dalam penentuan warga yang menerima bantuan program tersebut berdasarkan atas penunjukkan Kepala Desa Pesikaian bahkan warga yang tidak memiliki rumah juga mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dalam hal ini merujuk pada Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Melihat Kinerja Birokrasi dari pelaksanaan Program tersebut yakni dari Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi,

Pemerintah Desa Pesikaian pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari Tugas masing masing sampai perlunya evaluasi setelah pelaksanaan program bantuan tersebut yang sudah berjalan.

a. Adanya Tugas dan pembagian Tanggung Jawab.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini melakukan tugas dengan tim teknis fasilitator yaitu melakukan nya sejak awal, mulai memonitoring dari sosialisasi program dalam tahapan pengenalan, kriteria warga yang boleh menerima, lalu menyampaikan poin poin persyaratan nya apa saja sampai dengan mengawasi

jalannya penyelenggaraan program tersebut agar tercapai dengan baik sehingga ini perlu di awasi oleh pemerintah desa setempat dalam bahu membahu koordinasi antara kami dengan pihak pemerintah desa setempat.

Begitupun dengan pemerintah desa dimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah Desa Pesikaian telah memfasilitasi program yang disampaikan oleh pihak dinas bersangkutan untuk melaksanakan kebijakan bantuan program tersebut. Pemerintah desa dan Dinas Perkim saling melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program BSPS sehingga cukup selektif untuk mengawasi jalannya program. Oleh karena itu dalam Tugas dan Tanggung jawab pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian dinilai cukup baik.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa dalam tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan Kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pesikaian yaitu dilakukannya sosialisasi mulai memonitoring dari sosialisasi program dalam tahapan pengenalan, kriteria warga yang boleh menerima, lalu menyampaikan poin poin persyaratannya apa saja sampai dengan mengawasi jalannya penyelenggaraan program tersebut agar tercapai dengan baik sehingga ini perlu di awasi oleh pemerintah desa Pesikaian. hasilnya terlihat dilapangan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian berjalan dengan baik hingga terselesaikan perbaikan bedah rumah warga tidak layak huni.

b. Adanya Evaluasi setelah dilakukan pelaksanaan program.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal evaluasi Dinas Perkim melakukannya setelah pelaksanaan terselesaikan rehab rumah warga tidak layak huni pelaksanaan fisik dan serah terima mengevaluasi fisik pada bangunan. lalu juga yang tak kalah penting lainnya yaitu apakah warga menerima bantuan merasa puas mendapatkan bantuan ini sampai rumahnya terselesaikan. Penilaian yang dilakukan per satu rumah keseluruhannya mulai dari sosialisasi pemahaman program yang disampaikan pada warga penerima, memantau perkembangan program BSPS ini hingga rumah terselesaikan tanpa adanya kendala. Selanjutnya tim teknis dari dinas perkim kuantan singingi menilai apakah tepat sasaran bagi warga penerima bantuan, rumahnya diperbaiki sampai fisik keadaan sekaligus serah terima bantuan. Sementara dalam lingkup pemerintah desa evaluasi dilakukan dengan menyarankan sekiranya apa yang kurang dalam tahap pelaksanaan program, contohnya seperti meningkatkan sosialisasi program.

Sehingga yang perlu di evaluasi setelah pelaksanaan kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pesikaian berupa Tugas masing masing antara pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dan juga Pemerintah Desa Pesikaian yaitu menyampaikan pengenalan program kepada masyarakat Desa Pesikaian yang memiliki rumah tetapi tidak memiliki biaya perbaikan rumah yang rusak karena tidak layak huni mulai dari sosialisasi program, pengenalan program, kriteria syarat dan mengawasi jalannya penyelenggaraan program bantuan tersebut.

Berdasarkan Observasi diketahui bahwa Warga Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian mengatakan bahwa Birokrasi pada program tersebut adalah Tugas wewenang Pemerintah Desa Pesikaian dalam hal ini yaitu melakukan memonitoring jalannya program bantuan tersebut mulai dari sosialisasi program sampai mengawasi program agar berjalan dengan lancar, hanya saja menurut pengakuan seorang warga tersebut bahwa perlunya di perluas sosialisasi program bantuan stimulant perumahan swadaya bagi semua masyarakat desa pesikaian dan agar

jangan terjadinya kecemburuan sosial dan sekiranya pihak tentu kepala desa pesikaian mau bisa lebih detail dan lebih bijaksana dalam seleksi memilih warga yang layak menerima bantuan program ini agar jangan sampai terjadinya kecemburuan sosial dari kebijakan Pemerintah Desa Pesikaian dalam memilih warga dalam ikut serta menerima bantuan program Bedah Rumah swadaya Tersebut..

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi, dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Pada Sturuktur Birokrasi dari Pemerintah Desa Pesikaian beragam reaksi tanggapannya, dalam hal ini dari segi Pengetahuan saja dari pihak Kepala Desa Pesikaian hanya mengetahui pemahaman pada tujuan program dalam memperbaiki rumah warga yang rusak dengan menjalan tugasnya untuk memfasilitasi maupun mengawasi jalann bantuan program stimulant perumahan swadaya bagi masyarakat desa pesikaian yang ikut serta menerima program bantuan perumahan swadaya tersebut.

Sementara di satu sisi yang lain dalam penjelasan dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tentunya harus dilakukan penyampaian tugas nya berupa sosialisasi program dalam tahapan pengenalan, kriteria warga yang boleh menerima,lalu menyampaikan poin poin persyaratan nya apa saja sampai dengan mengawasi jalannya penyelenggaraan program tersebut agar tercapai dengan baik sehingga ini perlu di awasi oleh Pemerintah Desa Pesikaian. perlunya di perluas lagi sosialisasi program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) bagi semua masyarakat Desa Pesikaian dan agar jangan terjadinya kecemburuan sosial dan sekiranya pihak tentu Kepala Desa Pesikaian mau bisa lebih detail dan lebih bijaksana dalam seleksi memilih warga yang layak menerima bantuan program ini agar jangan sampai terjadinya kecemburuan sosial dari kebijakan Pemerintah Desa Pesikaian dalam memilih warga dalam ikut serta menerima bantuan program Bedah Rumah swadaya Tersebut.

Adapun hambatan hambatan yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Masih Kurangnya tingkat Pemahaman Dari Pemerintah Desa Pesikaian terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian, hal ini dikarenakan hanya mengetahui tujuan program dalam hal memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni.
2. Masih kurangnya sosialisasi program yang harus di sampaikan kepada masyarakat Desa Pesikaian oleh Pemerintah Desa Pesikaian secara menyeluruh mulai dari syarat kriteria warga yang menerima bantuan sampai tidak semua warga Desa Pesikaian mengetahui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian karena atas dasar pemilihan dari pemerintah desa pesikaian dalam menilai warga nya yang boleh menerima bantuan sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial bagi sehingga sebagian warga yang tidak mengetahui adanya program tersebut di Desa Pesikaian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan sebelumnya, Kesimpulan Dari Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dinilai cukup baik hal ini

dikarenakan tidak adanya kendala dalam perbaikan rumah warga sampai pada akhirnya rumah warga menjadi terselesaikan, namun masih minimnya responsif pemahaman program yang diketahui oleh Pemerintah Desa Pesikaian terkait syarat penerima bantuan yang layak diterima oleh warga desa pesikaian sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran bagi warga yang tidak layak menerima bantuan, salah satunya adanya warga desa pesikaian yang awalnya tidak memiliki rumah akhirnya memiliki rumah dengan adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian.

2. Kurangnya sosialisasi Program secara menyeluruh perlunya harus disampaikan oleh Pemerintah Desa Pesikaian kepada semua masyarakat Desa Pesikaian hal ini dikarenakan masih terjadinya kecemburuan sosial ditengah masyarakat Desa Pesikaian sehingga masih ada sebagian masyarakat desa pesikaian tidak mengetahui adanya Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya Di Desa Pesikaian.

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada Pihak Pemerintah Desa Pesikaian sekiranya perlu di pahami dulu terkait pemahaman program dari pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mulai dari kriteria warga yang layak menerima bantuan sampai pada sosialisasi program agar diketahui oleh semua warga desa agar tidak terjadinya kecemburuan sosial ditengah masyarakat.
2. Kepada pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sekiranya perlu meningkatkan koordinasi kerja sama dengan pemerintah Desa Pesikaian terkait pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar tidak terjadinya kesalah pahaman pemerintah desa pesikaian dalam pelaksanaan program tersebut terutama kriteria warga yang boleh menerima program bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2001). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 35-47.
- Mamangkey, A. L. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3.
- Maulidiah, R. R. (2015). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 744-754.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Priadi, A. R. (2018). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat. *Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara.*

Puryanto, P. &. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. *Ensiklopedia Social Review, 85-91.*

Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Serta Proses dan Teori*. Yogyakarta: Gramedia .